

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAMBI



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 serta Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 mendatang dengan mengakomodir kebutuhan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Provinsi Jambi Sehingga dapat menunjang Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang tertuang dalam RPJMD serta menjadi pedoman perangkat daerah maupun *stakeholder* yang membutuhkan.

Demikian, semoga Rancangan Rencana Kerja ini dapat memberikan dukungan terhadap Peran dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, terima kasih.

Jambi, Januari 2025
KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip. 196912151990031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan sasaran.....	29
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 2. 2 Realisasi Belanja Daerah</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 2. 3 Capaian Indikator Utama</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 2. 4 Kategori Mutu Pelayanan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2. 5 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sakip Tahun 2022-2024.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022-2024</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2. 8 IKM Tahun 2024</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 3. 1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Tahun Anggaran 2026</i>	<i>35</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun oleh perangkat Daerah yang berisi lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Program dan kegiatan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memelihara dan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain perencanaan adalah suatu konsep dinamis dan fleksibel tentang persoalan masa depan, yang intinya memuat beberapa pilihan atau alternative program prioritas, optimalisasi alokasi sumberdaya yang tersedia dan efisiensi.

Dalam suatu progres kegiatan pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, apabila fungsi-fungsi dari management seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan sebagai salah satu dari fungsi management memiliki fungsi yang sama strategisnya dibandingkan dengan fungsi-fungsi management yang lainnya. Karena Perencanaan dapat dijadikan sebagai alat yang tepat untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu perencanaan suatu kegiatan menjadi sangat penting, karena kita dihadapkan pada suatu kondisi dimana kebutuhan yang diinginkan tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada (sumber daya alam,

sumber daya buatan dan SDM) terbatas, sehingga kita harus memilih beberapa alternative dan skala prioritas. Bila kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian itu, maka perencanaan mutlak untuk dijadikan sebagai bahan mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu :

1. Perencanaan harus bersifat rasional, yaitu perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan secara cermat, logis dan dapat di operasionalkan.
2. Perencanaan bersifat fleksibel, berarti luwes, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Perencanaan bersifat kontinyu, artinya perencanaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Untuk mewujudkan realita pembangunan yang terarah, tepat sasaran, rasional, akomodatif, berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat/anggota, maka perlu diadakan perencanaan yang di mulai dari bawah (bottom up) atau dikenal dengan perencanaan partisipatif yaitu perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak dan anggota organisasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholder. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan

Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan kewenangannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dan rumusan dalam menentukan arah kebijakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi dalam menunjang program pembangunan Kepala Daerah sehingga terjadi Sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai hasil yang terukur sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada .

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2026;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2026;
15. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKPD Provinsi Jambi

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun lalu diperlukan sebagai bahan penyusunan Renja tahun 2026. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu, sebagian besar sudah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, adapun program kerja dan kegiatan yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi untuk tahun Anggaran 2026 melaksanakan **4 program, 16 Kegiatan dan 55 Subkegiatan** untuk memenuhi **sasaran strategik**. Antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengelelolaan Keuangan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan semua program, subkegiatan dan kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. **1.170.786.810.728,-** yang terdiri dari :

Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan

Nama Program	Pagu Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 90.604.976.871,-
Program Pengelelolaan Keuangan	Rp. 1.063.045.019.397,-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.774.473.849,-
Program Pendapatan Daerah	Rp. 14.362.340.611,-
Jumlah.....	Rp. 1.170.786.810.728,-

Dengan realisasi Rp. **900.414.851.447,-** atau sebesar **76,91%**. Sasaran pembangunan yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatnya pendapatan daerah;

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) program pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Selama tahun 2025 telah diupayakan pelaksanaan program tersebut.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian program dan kegiatan 76,91 % dalam arti semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Adapun tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa;
2. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah;

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatnya pendapatan daerah;

Dari seluruh program dan kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2026, berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, program dan kegiatan tersebut terlihat dan tergambar dalam table 2.1, sedangkan realisasi Belanja Daerah tergambar pada table 2.2 berikut :



Tabel 2. 2 Realisasi Belanja Daerah

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

POSISI : 31 DESEMBER 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program / Kegiatan	Nama PPTK	Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			611.143.500	6.168.600	0	0	617.312.100	543.201.706	6.093.962	0	0	545.534.167	88,37	100,00	71.777.933
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Muhammad Asriani, SE	611.143.500	6.168.600	-	-	617.312.100	543.201.706	6.093.962	-	-	545.534.167	88,37	100,00	71.777.933
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			78.210.392.174	0	0	0	78.210.392.174	75.587.922.949	0	0	0	75.587.922.949	96,65	100,00	2.622.469.225
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Darno, SE	77.223.360.724	-	-	-	77.223.360.724	74.613.859.317	-	-	-	74.613.859.317	96,62	100,00	2.609.501.407
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Darno, SE	909.758.400	-	-	-	909.758.400	902.063.632	-	-	-	902.063.632	99,15	100,00	7.694.768
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Darno, SE	77.273.050	-	-	-	77.273.050	72.000.000	-	-	-	72.000.000	93,18	100,00	5.273.050
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.691.000	0	0	0	42.691.000	42.438.800	0	0	0	42.438.800	99,41	100,00	252.200
1	Penyusunan Perencanaan	Darno, SE	42.691.000	-	-	-	42.691.000	42.438.800	-	-	-	42.438.800	99,41	100,00	252.200



	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			217.194.600	0	0	0	217.194.600	120.535.092	0	0	0	120.535.092	55,50	100,00	96.659.508
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mardiana, SE	101.594.600	-	-	-	101.594.600	86.163.300	-	-	-	86.163.300	84,81	100,00	15.431.300
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mardiana, SE	115.600.000	-	-	-	115.600.000	34.371.792	-	-	-	34.371.792	29,73	100,00	81.228.208
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.786.723.610	0	0	0	2.786.723.610	2.490.021.283	0	0	0	2.490.021.283	89,35	100,00	296.702.327
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Darno, SE	117.627.450	-	-	-	117.627.450	79.588.250	-	-	-	79.588.250	67,66	100,00	38.039.200
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Darno, SE	116.419.100	-	-	-	116.419.100	114.301.200	-	-	-	114.301.200	98,18	100,00	2.117.900
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Darno, SE	1.778.716.250	-	-	-	1.778.716.250	1.701.878.163	-	-	-	1.701.878.163	95,68	100,00	76.838.087
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Mardiana, SE	37.056.810	-	-	-	37.056.810	35.750.000	-	-	-	35.750.000	96,47	100,00	1.306.810
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Darno, SE	392.904.000	-	-	-	392.904.000	320.149.500	-	-	-	320.149.500	81,48	100,00	72.754.500
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Darno, SE	344.000.000	-	-	-	344.000.000	238.354.170	-	-	-	238.354.170	69,29	100,00	105.645.830
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			327.320.010	2.391.541.125	0	0	2.718.861.135	301.147.256	2.268.807.400	0	0	2.569.954.656	94,52	100,00	148.906.479
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Darno, SE	327.320.010	2.391.541.125	-	-	2.718.861.135	301.147.256	2.268.807.400	-	-	2.569.954.656	94,52	100,00	148.906.479
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.382.372.252	0	0	0	3.382.372.252	3.007.082.164	0	0	0	3.007.082.164	88,90	100,00	375.290.088
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mardiana, SE	61.554.080	-	-	-	61.554.080	56.500.000	-	-	-	56.500.000	91,79	100,00	5.054.080
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Darno, SE	2.297.804.267	-	-	-	2.297.804.267	1.941.160.404	-	-	-	1.941.160.404	84,48	100,00	356.643.863



3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mardiana, SE	1.023.013.905	-	-	-	1.023.013.905	1.009.421.760	-	-	-	1.009.421.760	98,67	100,00	13.592.145
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.629.430.000	0	0	0	2.629.430.000	2.276.166.384	0	0	0	2.276.166.384	86,57	91,07	353.263.616
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Darno, SE	1.560.990.000	-	-	-	1.560.990.000	1.521.140.468	-	-	-	1.521.140.468	97,45	100,00	39.849.532
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Darno, SE	345.480.000	-	-	-	345.480.000	294.768.900	-	-	-	294.768.900	85,32	100,00	50.711.100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Darno, SE	722.960.000	-	-	-	722.960.000	460.257.016	-	-	-	460.257.016	63,66	67,52	262.702.984
9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.380.774.698	0	0	0	1.380.774.698	1.252.489.147	0	0	0	1.252.489.147	90,71	100,00	128.285.551
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Harsya Wardhana, SE	314.257.578	-	-	-	314.257.578	255.568.505	-	-	-	255.568.505	81,32	100,00	58.689.073
2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Mery Trijana, SE, ME	1.066.517.120	-	-	-	1.066.517.120	996.920.642	-	-	-	996.920.642	93,47	100,00	69.596.478
10. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			547.594.508	0	0	0	547.594.508	436.892.987	0	0	0	436.892.987	79,78	100,00	110.701.521
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Muhammad Fadlan, SE	354.100.324	-	-	-	354.100.324	250.695.321	-	-	-	250.695.321	70,80	100,00	103.405.003
2	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang	Mohd. Hapiz, SE	193.494.184	-	-	-	193.494.184	186.197.666	-	-	-	186.197.666	96,23	100,00	7.296.518



	Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.000.447.815	0	0	0	1.000.447.815	939.912.396	0	0	0	939.912.396	93,95	100,00	60.535.419
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Hilda Susanti, SE	261.628.000	-	-	-	261.628.000	224.086.298	-	-	-	224.086.298	85,65	100,00	37.541.702
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Hilda Susanti, SE	298.207.190	-	-	-	298.207.190	292.868.386	-	-	-	292.868.386	98,21	100,00	5.338.804
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Hilda Susanti, SE	260.456.375	-	-	-	260.456.375	246.724.554	-	-	-	246.724.554	94,73	100,00	13.731.821
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Hilda Susanti, SE	180.156.250	-	-	-	180.156.250	176.233.158	-	-	-	176.233.158	97,82	100,00	3.923.092
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			473.851.654	0	0	0	473.851.654	453.877.423	0	0	0	453.877.423	95,78	100,00	19.974.231
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi	Nuraini Dewi Erlita, SE	319.825.682	-	-	-	319.825.682	307.189.933	-	-	-	307.189.933	96,05	100,00	12.635.749



2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Mohd. Hapiz, SE	154.025.972	-	-	-	154.025.972	146.687.490	-	-	-	146.687.490	95,24	100,00	7.338.482
13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			109.860.000	0	8.547.877.996	1.050.480.981.726	1.059.138.719.722	93.408.000	0	0	794.308.834.875	794.402.242.875	75,00	83,54	264.736.476.847
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		109.860.000	-	-	168.200.000.000	168.309.860.000	93.408.000	-	0,00	54.665.772.000,00	54.759.180.000	32,53	52,63	113.550.680.000
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		-	-	8.547.877.996,00	-	8.547.877.996	-	-	-	-	0	0,00	0,00	8.547.877.996
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		-	-	-	882.280.981.726	882.280.981.726	-	-	0,00	739.643.062.875	739.643.062.875	83,83	90,25	142.637.918.851
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			503.631.000	0	0	0	503.631.000	496.863.024	0	0	0	496.863.024	98,66	100,00	6.767.976
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Rian Purnama, S.STP	503.631.000	-	-	-	503.631.000	496.863.024	-	-	-	496.863.024	98,66	100,00	6.767.976
15. Pengelolaan Barang Milik Daerah			2.774.473.849	0	0	0	2.774.473.849	2.425.551.743	0	0	0	2.425.551.743	87,42	92,64	348.922.106
1	Penyusunan Standar Harga	Rian Widianara, SE	84.185.200	-	-	-	84.185.200	73.763.503	-	-	-	73.763.503	87,62	100,00	10.421.697
2	Inventarisasi Barang Milik daerah	Mutia Vinolika, S. IP	1.555.987.700	-	-	-	1.555.987.700	1.351.732.951	-	-	-	1.351.732.951	86,87	86,87	204.254.749
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rian Widianara, SE	507.231.600	-	-	-	507.231.600	477.388.071	-	-	-	477.388.071	94,12	100,00	29.843.529
4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Askar Veto Tremudya, SE, MM	386.609.749	-	-	-	386.609.749	368.116.711	-	-	-	368.116.711	95,22	100,00	18.493.038



5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	Mutia Vinolika, S. IP	240.459.600	-	-	-	240.459.600	154.550.507	-	-	-	154.550.507	64,27	100,00	85.909.093
16. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			14.252.848.331	109.492.280	0	0	14.362.340.611	13.365.128.817	2.237.540	0	0	13.367.366.357	93,07	100,00	994.974.254
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aditya Rachman Prasetyo, SE, M.ak	631.392.500	-	-	-	631.392.500	537.629.010	-	-	-	537.629.010	85,15	100,00	93.763.490
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	R. Ilham Asri Aditya, S.SStp	1.998.977.512	-	-	-	1.998.977.512	1.808.679.241	-	-	-	1.808.679.241	90,48	100,00	190.298.271
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Deddy Wahyudi, S. Kom, M.SI	3.175.560.410	106.965.000	-	-	3.282.525.410	3.090.710.776	-	-	-	3.090.710.776	94,16	100,00	191.814.634
4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Eka Nopsarisa, S. Kom	335.477.642	-	-	-	335.477.642	203.857.240	-	-	-	203.857.240	60,77	100,00	131.620.402
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Shanti Marantikasari, SE	176.031.100	-	-	-	176.031.100	174.405.557	-	-	-	174.405.557	99,08	100,00	1.625.543
6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Iskandar Muda, SE, MM	291.787.370	-	-	-	291.787.370	270.526.121	-	-	-	270.526.121	92,71	100,00	21.261.249
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kota Jambi		1.335.593.448	-	-	-	1.335.593.448	1.330.441.730	-	-	-	1.330.441.730	99,61	100,00	5.151.718
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Muaro Jambi		797.593.750	-	-	-	797.593.750	791.443.228	-	-	-	791.443.228	99,23	100,00	6.150.522
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Batanghari		634.698.495	-	-	-	634.698.495	610.919.254	-	-	-	610.919.254	96,25	100,00	23.779.241



10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tanjung Jabung Barat		621.303.694	145.044	-	-	621.448.738	525.833.152	-	-	-	525.833.152	84,61	100,00	95.615.586
11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tanjung Jabung Timur		547.365.264	0	-	-	547.365.264	541.344.880	-	-	-	541.344.880	98,90	100,00	6.020.384
12	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Tebo		588.438.275	1.996.496	-	-	590.434.771	511.193.750	1.995.800	-	-	513.189.550	86,92	100,00	77.245.221
13	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Bungo		666.997.910	241.740	-	-	667.239.650	625.160.567	241.740	-	-	625.402.307	93,73	100,00	41.837.343
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sarolangun		820.774.961	-	-	-	820.774.961	754.192.855	-	-	-	754.192.855	91,89	100,00	66.582.106
15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Merangin		944.000.000	-	-	-	944.000.000	942.846.918	-	-	-	942.846.918	99,88	100,00	1.153.082
16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kerinci		686.856.000	144.000	-	-	687.000.000	645.944.538	-	-	-	645.944.538	94,02	100,00	41.055.462
TOTAL			109.250.749.001	2.507.202.005	8.547.877.996	1.050.480.981.726	1.170.786.810.728	103.832.639.171	2.277.138.902	0	794.308.834.875	900.414.851.447	76,91	85,08	270.371.959.281

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Membina dan memfasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan kesekretariatan Badan;
5. Melaksanakan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akuntansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan-perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengamanan barang milik daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.
11. Pelaksanaan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel capaian indikator utama sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	86	86,27%
		Predikat AKIP	BB	A
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	OPINI BPK	WTP	WTP
3	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79.56	92
4	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.25 %	11,29 %

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2026 akan digambarkan dengan perbandingan antara target, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan sebagai berikut :

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi dari masing-masing indikator kinerja untuk tahun 2019 sampai dengan 2023, dimana provinsi jambi tahun 2019 sampai dengan 2023 memperoleh Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan perasentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang tugas dan kedudukannya melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pajak, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi melalui UPTD PPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus melakukan Peningkatan Kualitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat karena pada hakikatnya tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, untuk mengetahui kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat Jambi sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melaksanakan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala melalui penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kualitas.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berisi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara Kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Tahun 2025 dalam laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi melakukan survey dengan hasil mutu pelayanan berdasarkan Indek sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Kategori Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25, 00- 64,99	D	Tidak Baik
65,00- 76,60	C	Kurang
76,61- 88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari keseluruhan Kuisioner (300 Kuisioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuisioner yang telah terisi tersebut diperoleh hasil berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 86,27** dengan angka Indeks sebesar B, maka Kinerja Unit Pelayanan ini berada dalam Mutu Pelayanan B dengan Kategori Baik, Karena berada dalam nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat: **76,61- 88,30** Perolehan Penilaian tergambar dalam Tabel 2 :

Tabel 2. 5 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan Pelayanan	4.273
2	Prosedur Pelayanan	4.241

3	Waktu Pelayanan	4.290
4	Biaya/Tarif	4.249
5	Produk/Hasil Pelayanan	4.254
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	4.237
7	Prilaku Petugas Pelayanan	4234
8	Maklumat Pelayanan	4.245
9	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	4.260

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sakip Tahun 2022-2024

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024
1	2	3	4	5
	PREDIKAT SAKIP	A	A	A

Dari target yang telah ditetapkan untuk predikat Sakip dari tahun 2022 sd 2024 dimana untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu A..

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2024 akan digambarkan dengan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 sampai tahun 2024 dengan table sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2022-2024

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN KINERJA 2024
1	2	3	4	5
	PROVINSI JAMBI	WTP	WTP	WTP

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja untuk tahun 2022 sampai dengan 2024, hasil perbandingan tersebut diperoleh opini dan persentase pencapaian target, berdasarkan table diatas indikator dicapai opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jambi dimana opini BPK Perwakilan Provinsi memperoleh Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan persentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yaitu Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Capaian Kinerja Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2025 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pengamanan barang daerah dimana target tahun 2024 sebesar 84,79 % telah terealisasi sebesar 97,13%, sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah.

Capaian Kinerja Persentase Peningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2026 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pendapatan asli daerah dimana target tahun 2025 sebesar 5,7 % telah terealisasi sebesar 7,90 %, sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2. 8 IKM Tahun 2024

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PER UNSUR LAYANAN TAHUN 2024
PADA KANTOR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPD) SE PROV. JAMBI TAHUN 2024

NO	KANTOR PPPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM / UNIT	MUTU PELAYANAN	KETERA NGAN
		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UNIT PELAYANAN BPKPD PROVINSI JAMBI	0,385	0,40 0	0,3 74	0,4 00	0,4 00	0,3 77	0,3 96	0,4 00	0,4 11	3,54 3	88,5 8	A	SANGAT BAIK
2	KOTA JAMBI	0,400	0,39 2	0,4 00	0,3 81	0,4 00	0,4 00	0,3 85	0,3 85	0,4 00	3,54 3	88,5 8	A	SANGAT BAIK
3	KABUPATEN MUARO JAMBI	0,389	0,38 1	0,3 92	0,4 00	0,3 89	0,3 95	0,3 81	0,3 85	0,3 81	3,49 3	87,3 3	B	BAIK
4	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0,389	0,39 6	0,3 96	0,3 81	0,3 89	0,3 89	0,4 00	0,3 96	0,3 74	3,51 0	87,7 5	B	BAIK
5	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	0,381	0,38 5	0,3 92	0,4 00	0,3 89	0,3 85	0,3 85	0,3 81	0,3 89	3,48 7	87,1 8	B	BAIK
6	KABUPATEN BATANGHARI	0,400	0,38 1	0,4 00	0,3 89	0,3 92	0,3 85	0,3 96	0,3 85	0,3 96	3,52 4	88,1 0	B	BAIK



7	KABUPATEN TEBO	0,385	0,40 0	0,3 85	0,3 85	0,3 83	0,3 85	0,3 89	0,3 85	0,3 81	3,47 8	86,9 5	B	BAIK
8	KABUPATEN SAROLANGUN	0,389	0,39 2	0,3 85	0,3 85	0,3 85	0,3 81	0,3 85	0,3 92	0,3 81	3,47 5	86,8 8	B	BAIK
9	KABUPATEN MERANGIN	0,385	0,39 6	0,3 92	0,3 92	0,3 81	0,3 81	0,3 77	0,3 77	0,3 96	3,47 7	86,9 3	B	BAIK
10	KABUPATEN BUNGO	0,392	0,38 9	0,3 89	0,4 00	0,3 85	0,3 85	0,3 89	0,3 89	0,3 92	3,51 0	87,7 5	B	BAIK
11	KABUPATEN KERINCI	0,389	0,38 1	0,3 89	0,3 81	0,3 89	0,4 00	0,3 92	0,3 81	0,4 00	3,50 2	87,5 5	B	BAIK
	JUMLAH IKM PER CPPD	4,284	4,29 3	4,2 94	4,2 94	4,2 82	4,2 63	4,2 75	4,2 56	4,3 01	38,5 42	963, 550		
	IKM UNIT PELAYANAN BPKPD PROV. JAMBI											86,2 7	B	BAIK

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

1. Kewenangan beberapa Samsat di Kabupaten/Kota masih belum optimal karena beberapa Samsat belum ditingkatkan menjadi Samsat penuh
2. Kualitas dan kuantitas SDM masih harus ditingkatkan
3. Belum sempurnanya sistem aplikasi komputerisasi Samsat dan belum tersedianya aplikasi pendapatan
4. Daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak kepada penerimaan Pajak Daerah
5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
7. Belum tertibnya Surat Pertanggung Jawaban
8. Penyampaian Bukti Pembayaran Pajak kurang tertib
9. Peraturan dalam penganggaran selalu berubah-ubah
10. Jaringan Koneksi tidak stabil sehingga jalannya aplikasi terhambat
11. Sarana dan Prasana belum dan tidak memadai sehingga suasana kerja tidak nyaman

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka menunjang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih telah merumuskan **Misi** dan **Misi** untuk membantu program kerja menuju suksesnya rencana strategis Provinsi Jambi menuju **JAMBI MANTAP**, adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI JAMBI MANTAP

“ Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT “

MISI JAMBI MANTAP

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien,**
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata,**
3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia.**

Visi dan Misi JAMBI MANTAP yang telah ditetapkan dan menjadi janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dirumuskan untuk mencapai cita-cita yang bertujuan :

1. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang

- berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.
 3. Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi sesuai Tugas dan Fungsi terus berupaya melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap peningkatkan pendapatan daerah serta tata kelola keuangan sesuai koridor dan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan dan menunjang hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Visi dan Misi.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan adanya peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan untuk terciptanya kemandirian daerah serta pengelolaan keuangan secara tertib, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang tangguh, guna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat terpenuhinya pembangunan Provinsi Jambi yang merata guna mempertegas arah kebijakan yang akan di ambil oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, maka ada beberapa langkah dalam menentukan rumusan yang mengaitkan antara permasalahan pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang telah di formulasikan sebelumnya, sehingga dari permasalahan yang ada akan ditemukan

jawaban sebagai sebuah solusi untuk dijadikan pokok-pokok pemikiran dalam perwujudan demi tercapainya cita-cita yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta sebagai ujung tombak dalam pembiayaan jalannya pembangunan di Provinsi Jambi dalam mengelola potensi-potensi yang akan menjadi sumber Pendapatan Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjalankan hal tersebut Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi sesuai tugas dan fungsinya mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan tujuan yang akan dicapai antara lain :

”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

”Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD”

Tabel 3.1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Pada Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Deviasi realisasi belanja terhadap	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

transparan dan akuntabel		belanja total dalam APBD					
-----------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi untuk 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2026 terdiri Program dan Kegiatan Pokok dan rutinitas perkantoran, Program dan Kegiatan Lintas Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Jambi serta kegiatan pendukung lainnya dapat dilihat sebagai berikut

A. Program dan Kegiatan Pokok

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
- Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

3 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

6 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah
- d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- e. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. Program dan Kegiatan Lintas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi sebagai Koordinator Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan Tata kelola keuangan serta pendapatan daerah

Adapun langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan serta melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi dan mitra kerja, disamping itu juga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas informasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yaitu :

I PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- 2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 3 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
- 5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**



6 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

II PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dapat dilihat pada



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Tahun Anggaran 2026

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026										
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah										
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
Badan Keuangan dan Aset Daerah										
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5	02				KEUANGAN					
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp4.301.478.524	Rp0	Rp121.000.000.000	Rp880.043.982.236	Rp1.005.345.460.760
5	02	02	1,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp1.792.000.011	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.792.000.011
5	02	02	1,01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp348.434.991	Rp0	Rp0	Rp0	Rp348.434.991
5	02	02	1,01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp1.443.565.020	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.443.565.020
5	02	02	1,02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp683.335.819	Rp0	Rp0	Rp0	Rp683.335.819
5	02	02	1,02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp430.880.943	Rp0	Rp0	Rp0	Rp430.880.943



Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	02	1,02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp252.454.876	Rp0	Rp0	Rp0	Rp252.454.876
5	02	02	1,03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp913.019.270	Rp0	Rp0	Rp0	Rp913.019.270
5	02	02	1,03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp258.540.735	Rp0	Rp0	Rp0	Rp258.540.735
5	02	02	1,03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp316.677.760	Rp0	Rp0	Rp0	Rp316.677.760
5	02	02	1,03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp269.076.415	Rp0	Rp0	Rp0	Rp269.076.415
5	02	02	1,03	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp68.724.360	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.724.360
5	02	02	1,04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp468.056.552	Rp0	Rp0	Rp0	Rp468.056.552
5	02	02	1,04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Rp279.941.337	Rp0	Rp0	Rp0	Rp279.941.337



Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
					Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					
5	02	02	1,04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp188.115.215	Rp0	Rp0	Rp0	Rp188.115.215
5	02	02	1,05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp111.160.000	Rp0	Rp121.000.000.000	Rp880.043.982.236	Rp1.001.155.142.236
5	02	02	1,05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp111.160.000	Rp0	Rp0	Rp178.954.000.000	Rp179.065.160.000
5	02	02	1,05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp0	Rp0	Rp121.000.000.000	Rp0	Rp121.000.000.000
5	02	02	1,05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp701.089.982.236	Rp701.089.982.236
5	02	02	1,06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp333.906.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.906.872
5	02	02	1,06	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Rp333.906.872	Rp0	Rp0	Rp0	Rp333.906.872
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp2.854.571.207	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.854.571.207
5	02	03	1,01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp2.854.571.207	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.854.571.207
5	02	03	1,01	0001	Penyusunan Standar Harga	Rp344.774.550	Rp0	Rp0	Rp0	Rp344.774.550
5	02	03	1,01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp14.880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.880.000



Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	03	1,01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp94.864.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp94.864.500
5	02	03	1,01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp636.850.701	Rp0	Rp0	Rp0	Rp636.850.701
5	02	03	1,01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp789.704.530	Rp0	Rp0	Rp0	Rp789.704.530
5	02	03	1,01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp229.030.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp229.030.000
5	02	03	1,01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp524.580.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp524.580.000
5	02	03	1,01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp219.886.926	Rp0	Rp0	Rp0	Rp219.886.926
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp19.844.285.749	Rp417.481.810	Rp0	Rp0	Rp20.261.767.559
5	02	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp363.364.527	Rp0	Rp0	Rp0	Rp363.364.527
5	02	01	1,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp100.497.475	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100.497.475
5	02	01	1,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp262.867.052	Rp0	Rp0	Rp0	Rp262.867.052
5	02	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp16.817.835.666	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.817.835.666
5	02	01	1,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp15.990.386.266	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.990.386.266
5	02	01	1,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp813.158.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp813.158.400



Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	01	1,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp14.291.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.291.000
5	02	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp33.358.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.358.980
5	02	01	1,03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp33.358.980	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.358.980
5	02	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp177.007.200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp177.007.200
5	02	01	1,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp121.898.700	Rp0	Rp0	Rp0	Rp121.898.700
5	02	01	1,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp55.108.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.108.500
5	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp336.349.895	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.349.895
5	02	01	1,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.108.220	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.108.220
5	02	01	1,06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp86.236.875	Rp0	Rp0	Rp0	Rp86.236.875
5	02	01	1,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp6.031.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.031.800
5	02	01	1,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp11.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.550.000
5	02	01	1,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp202.423.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp202.423.000
5	02	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0	Rp417.481.810	Rp0	Rp0	Rp417.481.810
5	02	01	1,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0	Rp417.481.810	Rp0	Rp0	Rp417.481.810
5	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.342.363.117	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.342.363.117



Kode					Uraian	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
5	02	01	1,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.562.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.562.900
5	02	01	1,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp162.989.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp162.989.000
5	02	01	1,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.176.811.217	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.176.811.217
5	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp774.006.364	Rp0	Rp0	Rp0	Rp774.006.364
5	02	01	1,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp600.318.364	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.318.364
5	02	01	1,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp67.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp67.200.000
5	02	01	1,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp106.488.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp106.488.000
Jumlah						Rp27.000.335.480	Rp417.481.810	Rp121.000.000.000	Rp880.043.982.236	Rp1.028.461.799.526

BAB V

PENUTUP

Pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*), Pembangunan bertujuan melaksanakan perubahan, tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau pada suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*), seluruh wilayah, perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan yang belum baik menuju perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pada hakikatnya, pembangunan yang paling utama adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan hanya untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berlangsung selalu berubah. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat yang berubah itu, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut. Untuk itu, diperlukan instrumen dan strategi yang harus sesuai dengan kelompok sasaran (*target group*) dan strategi induk yang dipilih.

Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan maka diperlukan perencanaan yang baik dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2026. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD Provinsi Jambi tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Provinsi Jambi tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi



Jambi, Januari 2025

KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina Utama Madya

Nip. 19691215 199003 1 005